

tem administrasi yang terlalu sentral. Sentralisasi ini hampir terjadi di segala bidang kehidupan kampus, mulai pada bidang akademik, penelitian, administrasi, sampai pada keuangan. Dari sistem ini, fakultas seolah hanya berhak mengusulkan, dan semua keputusan tergantung dan berada di tangan dan kekuasaan pusat. Dengan sistem sentralisasi semacam ini, hal-hal yang mestinya bisa dituntaskan oleh fakultas, dalam waktu cepat, akhirnya harus menunggu berbulan-bulan. Masih karena sistem ini, ada kesan, pihak pusat tidak mempercayai tingkat fakultas. Pada gilirannya, keberadaan fakultas berada pada posisi antara dilepas dan diikat, sama halnya dengan sekor ular yang kepalanya dilepas, tetapi ekornya dipegang. Padahal, tanpa harus meminta pekerjaan dan tugas dari fakultas, kantor pusat (institut) sendiri mempunyai setumpuk tugas dan pekerjaan lain, yang semestinya juga diselesaikan dalam waktu singkat dan cepat.

Kelemahan mendasar ketiga adalah sangat amat lemahnya sistem pengelolaan perpustakaan, baik di tingkat pusat, maupun fakultas, baik yang berhubungan dengan pengolahan buku yang ada, maupun pada sistem peminjaman, baik yang ada di perpustakaan, maupun di ruang baca. Barangkali tidak terlalu ber-

lebih kalau disebut, melihat pengaturan buku yang dimiliki perpustakaan-pun (khususnya di reference) tidak ada kesan keinginan dari pustakawan untuk merangsang para pembaca untuk lebih giat membaca buku yang dimiliki perpustakaan. Adalah merupakan suatu hal yang biasa kalau kita melihat lataan buku yang diletakkan dengan cara berlapis, yang berarti, si calon pembaca tidak mungkin mengetahui judul buku yang ada di barisan (lapisan) kedua.

Dengan buku yang sangat minim pun sesungguhnya bisa dimaksimalisasikan penggunaannya. Sebaliknya,

kalau buku yang sudah relatif minim kemudian tidak dimaksimalkan penggunaannya, maka apa kira-kira yang terjadi. Pihak pustakawan tidak harus belajar ke luar negeri tentang sistem pengelolaan, peminjaman di perpustakaan, dan semacam, tetapi cukup hanya dengan belajar dari universitas yang ada di Indonesia. Bahkan cukup di Yogyakarta, seperti belajar dari sistem peminjaman buku di perpustakaan UGM, dengan catatan diterapkan dengan sungguh-sungguh.

#### Beberapa alternatif

Melihat pada masalah-masalah mendasar tersebut di atas, maka mungkin ada sejumlah jalan keluar yang bisa

dipikirkan dan sekaligus bisa diaplikasikan.

**Pertama**, tidak usah terlalu repot-repot menambah jumlah lembaga penelitian, yang ada, baik di tingkat institut, maupun di tingkat fakultas, tetapi cukup hanya dengan memaksimalkan operasi lembaga atau institusi yang ada. Seberat apapun syarat yang harus dipenuhi dan dimiliki oleh seorang redaktur sebuah jurnal, penulis yaldn, masih bisa ditemukan pada diri sejumlah tenaga pengajar yang ada di IAIN, yang tidak terlalu sibuk dengan urusan dan tugas lain. Dengan kata lain, cari dan tempatkanlah orang yang bisa dan mempunyai waktu untuk mengelola lembaga penelitian yang ada. Orang yang mempunyai minat dan cukup waktu untuk mengelola, akan lebih baik, daripada orang yang sangat kualitatif, tetapi tidak pernah sempat mengurus.

**Kedua**, sehubungan dengan sistem administrasi yang terlalu sentral, seperti sekarang, sepertinya sudah waktunya dipikirkan ketepatan dan ketepatan waktunya. Apapun sistem yang dipakal, tentu bertujuan untuk terciptanya efisiensi dan efektifitas. Maka kalau satu sistem sudah terbukti kurang menjamin tujuan tersebut, kenapa tidak mungkin ditinjau kembali.

Seterusnya, sekecil dan

semintim apapun buku yang dimiliki sebuah perpustakaan, bukan berarti tidak bisa dimaksimalkan penggunaannya. Demikian sebaliknya, sebesar dan selengkap apapun buku yang tersedia di sebuah perpustakaan, kalau tidak dikelola dan diatur dengan baik, maka tidak akan terlalu membantu dalam mencapai tujuan keberhasilan proses belajar mengajar. Dengan ungkapan lain, pengelolaan perpustakaan yang baik, menempati posisi terpenting untuk merangsang minat baca. Maka walaupun IAIN mempunyai gedung yang sangat besar dan luas, selama mental loyalitas dan kecintaan terhadap tugas serta sikap melayani orang lain (pembaca) tidak berubah, maka tidak akan terlalu banyak memberikan makna berarti bagi masa depan dan kualitas keluaran IAIN.

#### Kesimpulan

Akhirnya, ada yang terpenting adalah bahwa manusia yang bisa maju dan berkembang adalah manusia yang senantiasa siap membuka telinganya lebar-lebar demi dan untuk perbaikan diri pada masa-masa yang akan datang. Sebaliknya, keptikan dan ketertutupan merupakan tanda-tanda yang akan mengubur diri dan lembaga secara lambat atau cepat. Wallahu a'lam bishshowab.

**Kholruddin Nasution**, Staf Pengajar Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

# Diperlukan Perguruan Tinggi Unggulan Bernilai Pesantren

**T**ERUS terang, lembaga pendidikan tinggi kita saat ini belum mampu memenuhi tuntutan pendidikan nasional secara utuh sebagaimana yang diamanatkan GBHN; terciptanya kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berilmu

<b>Pelita</b>	Jum'at, 24 Mei 1996
Tahun - nomor	: XXIII / 6959
Halaman - kolom	: IV/4-9 / VIII/1

Oleh A. Khudori Soleh

pengetahuan tinggi. Di samping, juga demi memenuhi keinginan orang tua wali murid, agar anak-anaknya mampu menguasai iptek dan sekaligus mempunyai modal keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Allah.

Padahal, masyarakat kita

sebenarnya - sangat membutuhkan adanya lembaga pendidikan ideal seperti itu. Yaitu lembaga pendidikan yang mampu memberikan ilmu pengetahuan dan teknologi maju (Iptek) sekaligus mampu menumbuhkan keimanan dan ketakwaan. Hal ini bisa dibuktikan dengan membludaknya calon mahasiswa yang ingin masuk IAIN ketika masih terbuka program tadaris; matematika dan bahasa Inggris. Sebab, disitu mereka bisa mendapat dua keuntungan; menguasai ilmu-ilmu umum (matematika dan bahasa Inggris) dan sekaligus ilmu-ilmu agama.

**Kondisi perguruan tinggi**

Perguruan tinggi kita saat ini, sebenarnya, telah banyak memberikan andil bagi pembangunan SDM nasional. Telah banyak sarjana atau ilmuwan dilahirkan di sana. Akan tetapi, bila dilihat dari segi kualitas keilmuan dan pembinaan moralnya, masih sangat jauh ketinggalan dan memprihatinkan.

Untuk soal kualitas, kiranya bisa dilihat dari segi relevansinya dengan dunia kerja. Pada tahun 1989, angka partisipasi pendidikan tinggi kita 2,3 persen, sedang Malaysia telah mencapai 5,1 persen dan Taiwan 10,1 persen. Selanjutnya, pada tahun 1991 ada kenaikan, menjadi 10 persen. Namun, itu juga belum bisa dibanggakan. Kita masih tetap jauh ketinggalan. Sebab, angka itu telah dicapai Korea pada tahun 1975. Dan sebagai perbandingan, angka partisipasi pendidikan tinggi 38 persen dicapai Filipina tahun 1985, Thailand 20 persen tahun 1985, Singapura 12 persen tahun 1983.

Rendahnya partisipasi pendidikan tinggi kita terhadap dunia kerja ini kemudian memunculkan masalah baru; soal pengangguran yang semakin tahun semakin meningkat. Dalam hasil suatu studi proyekasi yang diadakan ketika mempersiapkan Repelita V yang lalu disimpulkan bahwa apabila dunia pendidikan kita tetap berjalan sebagaimana yang ada sekarang, maka pada akhir Repelita V akan terdapat surplus tamatan pendidikan tinggi sebanyak

614,2 ribu, seterusnya satu juta lebih pada akhir Repelita VI dan 1,7 pada akhir Repelita VII (Tilaar, 1992).

Bahkan, bila dilihat dari poros pendidikan dasar pendidikan tinggi, ada kecenderungan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula peluangnya untuk menjadi penganggur. Dan surplus lulusan pendidikan tinggi ini, cenderung semakin berlipatlipat dari Repelita ke Repelita. Sedang pada pendidikan tingkat lanjutan pertama ke bawah, cenderung kurang adanya tenaga kerja terdidik.

Adapun tentang lemahnya pembinaan moral keagamaan di perguruan tinggi, bisa dibuktikan dengan banyaknya penculwengan, kolusi, Korupsi - yang menurut Sumitro sampai mencapai 30 persen dari dana pembangunan - yang dilakukan oleh "orang-orang besar" yang notabene pernah dididik di lembaga perguruan tinggi. Juga bisa dilihat dari seringnya muncul kasus kumpul kebo, maraknya budaya sontek-menyontek ketika ulangan, menjiplak skripsi, jual-beli nilai atau yang lain yang tidak sesuai dengan moral akademis dan moral agama.

Dari situ, apa yang dinamakan nilai-nilai keihlasan dalam menuntut ilmu akhirnya juga terasa hambar. Menguep. Kegiatan kuliah tidak lagi didasarkan pada niat yang murni untuk meningkatkan kualitas dan potensi diri sebagai aktualisasi ibadah, tapi bergeser ke arah tujuan-tujuan lain yang lebih pragmatis dan duniawi. Akibatnya, mereka masuk kuliah bukan untuk mencari ilmu, tetapi hanya mengejar nilai formalitas; angka-angka atau selembar ijazah, yang cara mendapatkannya bisa dengan jalan pintas sebagaimana yang banyak terjadi dalam kasus pendidikan kita.

Di sini, perguruan tinggi telah berubah menjadi "lembaga bisnis", bukan lagi sebagai lembaga mulia yang berfungsi sebagai penransfer nilai dan penggodakan moral.

**Lembaga pesantren**

Sementara itu, dunia pesantren, yang dinilai banyak kalangan sebagai lembaga

pendidikan nomor tiga - setelah lembaga pendidikan umum dan agama, dari MIN sampai IAIN - ternyata mempunyai banyak kelebihan dalam bidang pembentukan moral, yang itu justru sangat dibutuhkan dalam masa-masa Kegerasangan "Ruhani" seperti saat ini.

Di pondok pesantren, nilai-nilai keihlasan - yang di dunia perguruan tinggi telah banyak bergeser ke arah materialistik - justru tumbuh dengan subur. Dalam pandangan mereka, belajar mengajar, bukanlah semata-mata demi mengejar prestasi duniawi, tetapi merupakan salah satu dari realisasi ibadah. Mereka demikian tekun dan rajin dalam belajar, demi menggapai ridlo ilahi. Sedemikian, sehingga tidak dikenal dalam pesantren istilah kolosi nilai antarâ ustad dengan santri.

Di samping itu, pesantren juga punya nilai lebih dalam soal kemandirian dalam berwirausaha. Para santri punya gairah yang kuat untuk mandiri. Sehingga, dalam soal pengangguran yang telah mencapai ambang mengkhawatirkan dewasa ini, karena banyaknya sarjana yang tidak mendapat lahan kerja, justru para santri tidak ada yang menganggur. Mereka mau bekerja apa saja, tanpa pilih-pilih, asal halal. Dan dengan modal semangatnya tersebut, kita lihat, akhirnya banyak santri yang tidak hanya mampu menciptakan lapangan kerja yang baik untuk diri dan keluarganya, tetapi juga masyarakat lain.

**Penyebab rendahnya mutu dan moral di PT**

Rendahnya mutu perguruan tinggi kita sehingga selalu tertinggal oleh perguruan-perguruan tinggi negara-negara jiran, pada dasarnya adalah karena minimnya dana pendidikan yang diberikan pemerintah. Tahun 1994/1995, dunia pendidikan di Indonesia hanya mendapat jatah 3,9 persen dari APBN (JP. 7/01/94) dan pada tahun ini bahkan lebih minim; 4,3 persen. Seding di Malaysia, Korea Selatan, dan Filipina, lembaga pendidikan mendapat alokasi dana sebesar 30 persen dari APBN (Studwick, 1991).

Kondisi seperti ini tentu tidak bisa dibiarkan. Apalagi dalam memasuki era global dan pasar bebas nanti, dimana persaingan semakin tajam dan kualitas produk; termasuk produk perguruan tinggi semakin menjadi tuntutan, maka mau tidak mau lembaga perguruan tinggi kita juga harus mau dan mampu bersaing dengan lembaga-lembaga di luar negeri, minimal tidak kalah dengan lembaga pendidikan yang ada di negara-negara tetangga. Tanpa itu, atau kalau pendidikan kita tetap berjalan sebagaimana yang ada sekarang, maka kita jelas akan semakin tertinggal. Dan untuk bisa meningkatkan mutu, atau agar lembaga pendidikan kita mampu mengejar ketertinggalannya, maka itu berarti perlu ada tambahan dana yang besar untuk pendidikan, minimal empat kali lipat dari yang ada sekarang.

Adapun tentang penyebab lemahnya pembentukan dan pembinaan moral (keagamaan) di perguruan tinggi, rupanya, adalah karena kurikulum pendidikan kita kurang seimbang, antara muatan agama dan pengetahuan umumnya. Di Perguruan tinggi, kita lihat, untuk mencapai sarjana S1, seseorang harus menempuh sekitar 160 SKS, dan hanya 2 SKS yang berupa pendidikan atau pengetahuan keagamaan. Itupun sudah - untuk - meliputi pengetahuan agama yang amat luas; aqidah, syariah dan akhlak. Dalam perbandingan seperti itu, sudah barang tentu akan sulit bagi perguruan tinggi untuk mampu menelurkan sarjana-sarjana yang utuh sebagaimana yang diamanatkan GBHN. Yaitu membentuk manusia pembangunan yang beriman, bertakwa dan berilmu pengetahuan. Dan bila kita tengok kembali tujuan pendidikan nasional tersebut, maka kurikulum yang ada di perguruan tinggi saat ini, juga pada lembaga-lembaga dibawahnya, berarti patut ditinjau kembali, khususnya kurikulum lokalnya.

Memang ada perguruan tinggi yang memberikan tambahan pendidikan keagamaan sendiri secara khusus, seperti Universitas Muhammadiyah atau perguruan tinggi lain yang dikelola Al-Maarif, seperti Unt-

versitas Islam Malang (Unisma) atau yang lain. Di sana pendidikan agama mencapai 8 SKS. Namun, di sini kita juga masih patut bertanya, apakah itu sudah mencukupi?

Bukankah banyak juga sarjana yang mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang keagamaan, dan mereka dahulu dididik di perguruan tinggi umum? Secara kasualitas, memang tidak dipungkiri adanya kenyataan seperti itu. Saat ini ada - walau tidak banyak - tokoh-tokoh yang mempunyai kemampuan iptek tinggi sekaligus pengetahuan agama yang mendalam dan mereka pada mulanya menempuh pendidikan di perguruan tinggi (bukan di pesantren). Banyak contoh Guru Besar atau Profesor serta Doktor di berbagai bidang keilmuan yang ternyata memiliki kedalaman ilmu agama. Sehingga lantas sering terjadi ada profesor yang sekaligus seorang ustadz atau ustadzah. Banyak ilmuwan yang tampil sebagai penceramah agama di berbagai tempat.

Namun, hal itu bukan berarti materi pendidikan agama di perguruan tinggi telah mampu menggembleng seorang mahasiswa menjadi ahli dan bermoral agama yang kuat. Sebab, jika ada Guru Besar yang juga seorang ustadz, ternyata hal itu karena adanya gemblengan agama yang demikian intensif dalam keluarga atau lingkungannya. Bukan gemblengan resmi dari kampus. Sebab, secara logika, porsi mata kuliah agama 8 SKS, apalagi yang cuma 2 SKS, akan sulit bahkan mustahil untuk mampu membentuk seorang ilmuwan yang memiliki pengetahuan dan bermoral agama yang kuat.

### Kondisi kondusif pesantren

Terbentuknya sifat dan sikap yang amat menonjol dalam pribadi para santri sebagaimana yang dijelaskan di depan, adalah karena adanya sistem dan kondisi yang amat bagus dalam pesantren. Selama di pesantren, para santri - secara tidak langsung - telah dilatih untuk mandiri. Di sana mereka biasa memasak atau mencuci pakalannya sendiri. Mereka juga dibiasakan untuk

memenuhi kebutuhannya sendiri. Sedemikian, sehingga dari situ akhirnya tumbuh sikap tidak menggantungkan diri pada orang lain.

Ilmu-ilmu yang diberikan kepada para santri di pesantren, penekanannya adalah soal kemampuan aplikasinya. Yaitu kemampuan santri dalam menerjemahkannya dalam kehidupan sehari-hari, yang dalam pesantren dikenal dengan istilah ilmu manfaat.

Seorang santri akan dibilang berhasil dan memperoleh ilmu manfaat bila mampu mengaplikasikan ilmunya di masyarakat. Dan itu berarti merupakan berkah atau barokah. Sebaliknya, ketidakmampuannya berarti suatu aib atau ketidakberhasilan. Karena itu, setiap santri mesti berusaha mendayagunakan semua ilmu bila telah keluar. Dan karena itulah mengapa santri kemudian mempunyai "etos kerja" yang lebih baik daripada lulusan perguruan tinggi; santri lebih bisa diterima (berguna) di masyarakat. Tidak menganggur.

Struktur pengajaran yang unik dan khas seperti ini, akhirnya tentu saja - menghasilkan pandangan hidup dan visi yang khas pula. Yaitu bahwa visi untuk memperoleh penerimaan di sisi Allah di akhirat kelak, yang dalam pesantren dikenal dengan istilah "ihlash", menempati kedudukan utama. Mereka mau dengan tulus menerima apa saja kadar yang diberikan oleh kehidupan, terutama bila dipandang dari sudut kehidupan materil, asal pandangan ukhrawi bisa terpuaskan. Dari sini akhirnya para santri mampu menciptakan penerimaan perubahan-perubahan status dalam kehidupan dengan mudah. Sedemikian, sehingga para santri lebih bisa adaptif terhadap kemajuan dan lebih fleksibel dalam menempuh jenjang karir kelak. Ini tentu tidak akan bisa didapat dalam lulusan lembaga pendidikan yang lain.

Sistem yang bagus ini masih ditunjang dengan kondisi pesantren yang kondusif. Lingkungan pesantren, minimal terdiri atas asrama santri, kediaman kiai dan masjid atau aula tempat belajar. Ketiganya

merupakan satu kesatuan yang tidak belajar. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dan kiai, sebagai pimpinan pesantren, tidak hanya bertindak sebagai guru yang hanya bertugas mengajar untuk memberikan ilmu pengetahuan keagamaan, tetapi sekaligus juga sebagai pembimbing dan teladan bagi kehidupan keagamaan para santrinya. Karena itu, tidak jarang, pada malam-malam buta seorang kiai datang ke bilik para santri, membangunkannya untuk diajak sholat tahajud. Begitu pula ketika menjelang subuh.

Dengan kondisi dan model pengajaran yang demikian, maka metode pengajaran pesantren, berarti tidak hanya memakai sistem 7 atau 8 jam, tetapi sistem 24 jam. Sehingga dengan begitu, segala perilaku santri lebih bisa diarahkan, terbimbing dan terkontrol. Dan ini berarti juga salah satu kelebihan pesantren dibanding sistem pendidikan lainnya.

### Perguruan tinggi unggulan

Dengan melihat kondisi Perguruan tinggi kita yang seperti itu, juga demi memenuhi tuntutan GBHN dan untuk mengejar ketertinggalan kualitas dari lembaga-lembaga pendidikan - minimal di negara-negara tetangga dalam rangka

menyambut pasar bebas tahun 2020 nanti, maka lembaga pendidikan kita perlu dengan segera adanya sebuah lembaga pendidikan tinggi yang mampu membekali sains dan teknologi tinggi kepada para mahasiswanya, sekaligus mampu menanamkan moral keagamaan yang mendalam. Atau dengan kata lain, kita butuh sebuah Perguruan Tinggi Unggulan yang plus nilai-nilai moral pesantren.

Untuk merealisasikan sebuah lembaga pendidikan yang begitu ideal; perguruan tinggi yang mampu membekali sains dan teknologi tinggi sekaligus moral keagamaan yang kuat kepada mahasiswa, dalam jangka waktu yang relatif singkat, jelas bukanlah pekerjaan yang mudah. Bahkan mungkin suatu hal yang sangat sulit - kalau tidak boleh dikatakan mustahil. Karena

itu, dalam jangka pendek, kita bisa mengarah kesana dengan membuat sebuah lembaga pendidikan tinggi khusus, yang mampu memadukan segi-segi keunggulan perguruan tinggi dengan dimensi-dimensi positif pesantren.

Harus diakui bahwa bagaimanapun - walau mutunya masih kalah bersaing, bahkan tertinggal jauh dari lembaga-lembaga pendidikan yang ada di luar negeri - Perguruan Tinggi kita masih dikenal memiliki keunggulan dalam bidang penguasaan iptek. Perguruan tinggi masih tetap 'unggul' dalam masalah-masalah 'keilmuan', dibanding lembaga pendidikan yang lain. Karena itu, hal-hal yang baik ini bisa kita ambil untuk dipadukan dengan nilai-nilai positif pesantren.

Walau demikian, hal itu bukan berarti lantas Perguruan Tinggi Unggulan (PTU) akan berbentuk seperti "Pesantren Ali" (Pesantren Tinggi) atau IAIN yang bertujuan untuk menciptakan sarjana-sarjana ahli agama. PTU bukanlah 'tindak lanjut' dari IAIN dan tidak akan sama dengan IAIN atau "ma'had Ali". PTU hanya bertujuan menelorkan sarjana yang unggul dalam iptek sekaligus berkepribadian agamis. Dalam soal agama, masalah perilaku atau ahlak inilah yang dititik tekankan, walau ilmu agama juga diberikan dan penting. Karena itu, dalam kurikulum PTU itu nantinya, tidak semata-mata dengan menambahkan materi-materi agama dan jumlah besar, dengan perbandingan 50: 50 misalnya. Tidak. Materi agama bahkan hanya sekitar 30 SKS saja. 100 SKS lainnya tetap dengan ilmu-ilmu pengetahuan umum, dengan ditambah masalah kewiraswastaan dan kemandirian.

Walu bagaimanapun dengan model kurikulum seperti itu PTU mampu membentuk sarjana yang berperilaku agamis? Perilaku manusia sangat dipengaruhi lingkungannya. Karena itu, untuk menciptakan sarjana yang punya kepribadian santri (sarjana yang sujana, menurut istilah Bpk. Wahjoetomo), maka para mahasiswa PTU ini - akan dididik dalam lingkungan "pesantren". Kasarnya, mereka

diasramakan. Sehingga, dengan demikian, pembinaan mahasiswa dalam berbagai aspek kehidupan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Begitu pula aktivitas ekstra kurikulumnya.

Namun, model asrama yang dimaksudkan di sini bukanlah sekedar asrama sebagaimana yang sering kita jumpai di kota-kota, atau di instansi-instansi tertentu. Sistem asrama atau pemondokan bagi segenap mahasiswa TPU harus diupayakan sedemikian rupa sehingga mampu meniru dan menumbuhkan "dimensi positif" pesantren; baik dari segi kegiatan ataupun pembinaannya. Misalnya dalam soal kegiatan, sholat jamaah sehari-harinya, tahajud atau yang lain. Sedemikian, sehingga di sana bisa tumbuh rasa ketulusan, hubungan yang harmonis antara santri (mahasiswa) dengan kyai (dosen), antara mahasiswa dengan mahasiswa, juga kemandirian.

Sebagai gambaran yang mendekati gagasan ini, adalah seperti yang terjadi di Universitas "Darul Ulum" Jombang, Jawa Timur. Di sana, para mahasiswa mempelajari iptek di kampus, selanjutnya mendalami dan menjalani pembinaan agamanya di pesantren. Hanya saja, di Universitas "Darul Ulum" (Undar) tersebut, rupanya tidak dalam satu sistem dengan pondoknya. Pimpinannya berbeda, sehingga kadang juga - bisa - berbeda kebijakan yang diambil di antara keduanya. Selain itu, tidak semua mahasiswanya bertempat di pondok. Sedangkan dalam Perguruan Tinggi Unggulan (PTU), semua mahasiswa harus bertempat di pesantren. Dan dua lembaga tersebut harus ada dalam satu sistem yang tidak terpisahkan. Keduanya ada dibawah atau pimpinan; dibawah rektor misalnya, sehingga kegiatan dan keberadaannya bisa saling menunjang.

Dengan format seperti itu, Perguruan Tinggi Unggulan (PTU) kiranya akan tampil dengan sosok yang baru; lembaga pendidikan tinggi yang relatif lebih kompleks dibanding lembaga pendidikan lainnya. Dan bila gagasan ini bisa direalisasikan, maka tujuan

pembangunan nasional; menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, kiranya akan cepat bisa terwujud. Karena, dengan modal agama, keimanan dan ketaqwannya, para insan pembangunan kita tidak mudah untuk melakukan kolosi-kolosi, korupsi, penye-

lewengan, sehingga mampu melaksanakan amanat yang telah diberikan rakyat.

Ada tiga ciri pokok dalam Perguruan Tinggi Unggulan ini. Yakni, kecunggulan penguasaan iptek, intensitas kajian ilmu-ilmu agama dengan amalan-amalannya, serta jiwa kemandirian. Dalam Perguruan Tinggi Unggulan ini, mahasiswa harus mampu menguasai iptek. Sehingga, bila telah keluar kelak, mereka tidak akan kalah bersaing dengan alumni perguruan tinggi yang lain. Sedang dalam pengkajian ilmu agama, dilakukan secara intensif dan bertahap. Pertama di bangku kuliah, kemudian dilatih amaliah sehari-harinya di pesantren. Dan yang penting diperhatikan, dalam soal kajian agama ini, bukan lagi masalah bagaimana kita beragama yang dibahas, tetapi sudah pada tingkat mengapa kita beragama. Untuk apa, dan lainnya yang bersifat mencari hakekat makna yang terkandung serta pengamalannya. Karena, soal-soal bagaimana kita beragama telah dipelajari sejak tingkat dasar.

#### Biaya dari investor

Perguruan Tinggi Unggulan (PTU), karena ia diharapkan mampu bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan di luar negeri dalam masalah iptek dan mampu membekali alumuninya dengan kekuatan moral agama yang kokoh, maka dalam realisasinya jelas membutuhkan dana yang sangat besar. Dan ini, ternyata juga telah menjadi masalah yang menyebabkan dunia pendidikan kita tertinggal dari lembaga pendidikan di luar negeri. Karena itu, dalam masalah pengelolaan PTU ini ada gagasan untuk diserahkan kepada investor; bisa dari dalam negeri maupun luar negeri (investor asing).

Gagasan ini mungkin agak

asing bagi kita. Akan tetapi, ini didasarkan pada beberapa alasan yang kiranya bisa diterima (dipertimbangkan). Pertama, saat ini kita tidak mungkin mampu menaikan anggaran dana pendidikan sampai minimal 30 persen dari APBN, untuk mengejar ketertinggalannya dengan negara-negara tetangga. Padahal, lembaga pendidikan kita sangat jauh ketinggalan dibanding mereka, karena memang tidak adanya dana yang memadai. Dan kita dituntut untuk segera mengejar ketertinggalan tersebut, di samping pembekalan keimanan, bila tetap ingin eksis dalam era global nanti.

Kedua, untuk menghemat

biaya dan menjaga moral plus nasionalisme. Bila para pemuda kita sekolah di PTU (di dalam negeri), karena mutunya yang tidak kalah dengan yang di luar, maka berarti bisa menghemat biaya pendidikan bila dibanding dengan sekolah di sana (di luar). Minimal biaya hidup lebih ringan, di samping rasa nasionalismenya tidak akan luntur dan pembinaan moralnya terjamin.

Ketiga, bisa untuk menarik devisa. Bila PTU ini bermutu karena adanya dana yang besar dari investor, sehingga akhirnya mampu membuka kelas-kelas internasional, maka ini berarti memasukkan devisa bagi negara. Di sini, Australia sehingga ribuan mahasiswa luar negeri datang ke sana. Dan Australia sempat merah devisa ketiga besarnya dari sektor industri jasa pendidikan.

Keempat, bisa merangsang perkembangan pendidikan di tanah air. Dengan adanya peran investor sehingga PTU memiliki mutu dan peralatan yang lebih lengkap disini, maka mau tak mau, hal itu akan merangsang lembaga-lembaga pendidikan yang ada untuk lebih meningkatkan kualitasnya, bila mereka tetap ingin eksis. Dan itu berarti akan menciptakan kompetisi yang dinamik di antara lembaga-lembaga pendidikan yang ada di tanah air. Sedemikian, sehingga akan semakin mempercepat terciptanya keberhasilan pendidikan nasional.

Namun demikian, dalam soal pengelolaan PTU ini, tidak

lantas semuanya diserahkan kepada investor (asing). Harus dipahami, prinsip pendidikan di luar negeri tidak sama dengan prinsip pendidikan nasional kita. Di Barat, lembaga pendidikan hanya menekankan soal intelektualitas atau iptek. Sedang di negara, sebagaimana dijelaskan dalam GBHN 1993, prinsip pendidikan meliputi tiga hal: keunggulan iptek, religiusitas atau peningkatan Imlaq (Iman dan Taqwa) dan nasionalisme.

Karena itu, dalam penangan PTU ini nantinya, ada pembagian tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri. Dan karena salah satu tujuan PTU adalah membekali mahasiswa dengan kekuatan iman dan moral yang tangguh, maka di antara tiga prinsip pendidikan tersebut, hanya soal iptek saja yang bisa diserahkan kepada mereka untuk ditangani dengan harapan penguasaan iptek kita akan lebih maju. Sedang dua prinsip lainnya, tetap kita tangani sendiri. Yaitu, pembinaan keimanan dan ketakwaan termasuk nasionalisme.

Selanjutnya, disadari juga bahwa biaya pendidikan di PTU ini, karena alasan kualitas dan kelengkapan fasilitas, mungkin agak sedikit mahal. Sehingga, mungkin, agak kurang bisa terjangkau oleh kalangan menengah ke bawah. Untuk menghindari kesenjangan dan untuk mengatasi hal ini, maka diatur bahwa 15 sampai 25 persen dari kursi yang ada di PTU tersebut harus diberikan kepada para pemuda yang cerdas tapi secara ekonomis kurang mampu. Dengan demikian tidak akan terjadi kesenjangan dibidang pendidikan antara kalangan yang mampu dengan golongan yang tidak mampu.

A. Khudori Soleh adalah  
alumnus IAIN M